



# Pengaruh Fiscal Stress, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018-2022

Hastina Zahro<sup>1\*</sup>, Hailuddin<sup>1</sup>, Irwan Suriadi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

## Article Info

Received: June 20, 2025

Revised: August 30, 2025

Accepted: September 15, 2025

Published: September 30, 2025

Corresponding Author:

Hastina Zahro

[zahrohastina@gmail.com](mailto:zahrohastina@gmail.com)

DOI: [10.29303/alexandria.v6i2.715](https://doi.org/10.29303/alexandria.v6i2.715)

© 2025 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



**Abstract:** This research aims to determine the influence of fiscal stress, local original income, and balancing funds on the financial independence of districts/cities in NTB Province in 2018-2022. This research will also analyze which variables have a dominant influence on regional financial independence. The research method used is a quantitative method, associative causality research type, using panel data regression analysis tools with the fixed effect model method and using Eviews 12 software. The results of this research show that the Fiscal Stress variable does not have a partially significant effect on the District/City Regional Financial Independence variable in NTB Province, while the Regional Original Income variable is able to provide a significant positive influence and the Balancing Fund variable is able to provide a partially significant negative influence on the Regency/City Regional Financial Independence variable in NTB Province. Meanwhile, the variables Fiscal Stress, Regional Original Income, and Balancing Funds can simultaneously have a significant influence on the Regional Financial Independence variable. Then the Original Regional Income variable is the dominant factor influencing the level of Regency/City Regional Financial Independence in NTB Province.

**Keywords:** Fiscal Stress, Regional Original Income, Balancing Fund, Regional Financial Independence.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Fiscal Stress*, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2018- 2022. Penelitian ini juga akan menganalisis variabel manakah yang dominan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif jenis penelitian asosiatif kausalitas, menggunakan alat analisis regresi data panel dengan metode *fixed effect model* dan menggunakan *Software Eviews 12*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Fiscal Stress* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah mampu memberikan pengaruh positif signifikan dan variabel Dana Perimbangan mampu memberikan pengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Adapun secara simultan Variabel *Fiscal Stress*, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersamaan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah. Kemudian variabel Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang dominan mempengaruhi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

**Kata Kunci:** *Fiscal Stress*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kemandirian Keuangan Daerah.

## How to Cite:

Zahro, H., Hailuddin, & Suriadi, I. (2025). Pengaruh Fiscal Stress, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018-2022. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 6(2), 339-345. <https://doi.org/10.29303/alexandria.v6i2.715>

## Pendahuluan

Pembangunan pada Negara berkembang seperti di Indonesia merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa dengan cara peningkatan perekonomian guna dalam proses membuka jalan untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada secara benar dan maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Maulana (2022) perlu adanya kebijakan-kebijakan guna menetralsir proses pembangunan, dan salah satu kewenangan yang dimiliki daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu melakukan pengelolaan keuangan daerah di masing-masing daerah yang telah diberikan, agar dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kemajuan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Menurut Halim (2013) kemandirian keuangan daerah didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan secara mandiri menjadi tuntutan yang nyata, sehingga seluruh potensi dapat dioptimalisasikan melalui mekanisme perencanaan secara tepat. Menurut Azwar (2023) daerah diharapkan dapat mengalokasikan dana APBN ke sektor-sektor yang menghasilkan investasi yang lebih besar, serta sektor yang meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh wilayah otonom di Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut Bappenda (2023) Provinsi NTB dihadapkan pada permasalahan dari tuntutan terhadap kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan hingga terwujud kemandirian keuangan daerah secara bertahap akan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan Dana Transfer pemerintah pusat, tuntutan kualitas pelayanan yang semakin baik, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tetap diarahkan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Selama priode 2018-2022 kondisi perekonomian mengalami perkembangan yang sedikit terlambat. Akan tetapi rasio kemandirian Provinsi NTB selama tahun 2011-2022 dapat dikategorikan dalam jenis pola hubungan partisipatif karena selama priode tersebut

rasio kemandirian daerah  $>50\%$  (diatas 50%), artinya tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah sedang. Dimana peran pemerintah pusat semakin berkurang dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah karena sudah mampu melaksanakan otonomi daerah.

Sepuluh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB selama priode tahun 2018-2022 memiliki rata-rata rasio kemandirian dibawah 50%, menunjukkan pola hubungan konsultatif, artinya tingkat kemandirian pemerintah daerah rendah. Dimana, semua daerah masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat dan lebih dominan dalam mengandalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dari sepuluh kabupaten/kota hanya Kota Mataram yang paling tinggi nilai rata-rata rasio kemandirian sebesar 42,13%, hal ini dikarenakan Kota Mataram memiliki kondisi perekonomian yang berkembang karena menjadi ikon daerah di Provinsi NTB, akan tetapi tetap masih belum mencapai target tingkat kemandirian yang baik. Sehingga, masih dalam kategori pola hubungan konsultif yaitu tingkat kemandirian yang rendah. Namun, dianggap sedikit lebih mampu membiayai kegiatan daerahnya secara mandiri. Kemudian sembilan daerah Kabupaten-Kota memiliki pola hubungan Instruktif dengan rata-rata rasio kemandirian di bawah 25%, artinya tingkat kemandirian pemerintah daerah sangat rendah. Peran pemerintah pusat lebih dominan dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah.

## Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian asosiatif kausalitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian asosiatif kausalitas adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini akan menjelaskan hubungan antar satu variabel dengan variabel lain yang memiliki sebab akibat. Penelitian ini menguji hipotesis yang ditetapkan, dan untuk mencari pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Lokasi penelitian di sepuluh Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, pengambilan data dilakukan pada Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB. Rentang waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan menghimpun informasi akurat yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian dapat diperoleh dari

dokumen, buku ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, serta dari instansi terkait.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka atau bilangan yang dapat diukur besarnya dan dapat dihitung secara pasti. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series dan *cross section* dari tahun 2018- 2022. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, atau instansi dan sumber lain penyedia data. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Model analisis data dalam penelitian ini yaitu dari estimasi regresi data panel yang memiliki tiga pilihan model digunakan dalam mengestimasi data panel, diantaranya:

1. *Common Effect Model* (CEM)
2. *Fixed Effet Model* (FEM)
3. *Random Effect Model* (REM)

Pemilihan uji signifikansi data panel untuk menentukan salah satu model yang diestimasi yang dianggap paling tepat dari ketiga jenis model estimasi maka dilakukan serangkaian pengujian data panel dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Uji *Chow* (CEM vs FEM)
2. Uji *Hausman* (FEM vs REM)
3. Uji *Lagrange Multiplier* (REM vs CEM)

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah dalam menganalisis data. Pengujian ini dilakukan agar mendapatkan model persamaan regresi yang baik dan benar serta mampu memberikan estimasi yang handal dan tidak bias sesuai kaidah BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Berikut adalah uji asusi klasik yang digunakan dalam enelitian ini:

1. Uji Normalitas
2. Uji Multikolinieritas
3. Uji Autokorelasi
4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Hipotesis yang dilakukan setelah mengestimasi hasil dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Uji t Statistik
2. Uji F Statistik
3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

Dari hasil tiga uji model dalam mengestimasi regresi dataa panel, yaitu:

**Tabel 1.** Hasil Kesimpulan Pengujian Signifikansi Data Panel

No.	Model	Pengujian	Hasil
1	Uji <i>Chow</i>	CEM vs FEM	FEM
2	Uji <i>Hausman</i>	REM vs FEM	FEM
3	Uji <i>Lagerangr Multiplier</i>	CEM vs REM	REM

Uji *lagrange multiplier* tidak digunakan apabila dalam uji *chow* dan uji *hausman* menunjukkan model yang paling tepat adalah *fixed effect model*. Oleh sebab itu, dapt disimpulkan pada penelitian ini model yang digunakan untuk estimasi data panel adalah *fixed effect model* untuk menentukan Pengaruh *Fiscal Stress*, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2022.

Berikut adalah tabel *fixed effect* model yang telah diolah dengan menggunakan *software eviews 12*.

**Tabel 2.** Hasil Analisis Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.51168	2.383586	5.668637	0.0000
X1	0.001563	0.002315	0.675186	0.5038
X2	0.078726	0.006877	11.44780	0.0000
X3	-0.011269	0.001890	-5.962529	0.0000

Berdasarkan Tabel 2 dapat disusun persamaan regresi data panel dengan *fixed effect model*, diantaranya:

$$Y_{it} = 13.511 + 0.001X_{1it} + 0.078X_{2it} - 0.011X_{3it}$$

Dimana:

Y = Kemandirian Keuangan Daerah

X<sub>1</sub> = *Fiscal Stress*

X<sub>2</sub> = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>3</sub> = Dana Perimbangan

Persamaan regresi data panel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

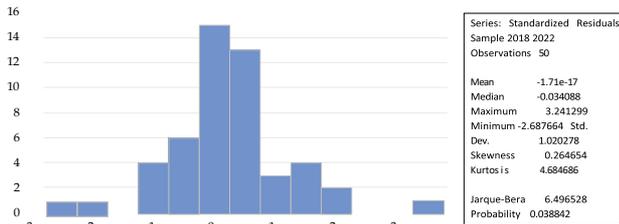
1. Nilai konstanta sebesar 13.51168, artinya jika nilai semua variabel independen *Fiscal Stress*, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan bernilai nol, maka nilai kemandirian keuangan daerah sebesar 13.51168.
2. Nilai koefisien *Fiscal Stress* positif 0.001563, artinya setiap kenaikan variabel *fiscal stress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar satu (milyar rupiah), akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 0.001563.
3. Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah positif 0.078726, artinya setiap kenaikan variabel pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar satu (milyar

rupiah), akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 0.078726.

4. Nilai koefisien Dana Perimbangan negatif 0.011269, artinya setiap kenaikan variabel dana perimbangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar satu (milyar rupiah) dalam dana perimbangan justru mengurangi kemandirian keuangan daerah sebesar 0.011269.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasi Uji Normalitas- Jarque-Bera (JB)



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas- Jarque-Bera (JB)

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa hasil dari uji normalitas yang dilakukan dinyatakan data berdistribusi tidak normal dilihat dari nilai probabilitas Jarque-Beranya lebih kecil dari 0,05. Nilai probabilitas Jarque-Bera untuk data uji normalitas ini sebesar 0.038842. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.061926	-0.208177
X2	-0.061926	1.000000	0.467606
X3	-0.208177	0.467606	1.000000

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa hasil dari uji multikolinieritas yang dilakukan nilai korelasi X<sub>1</sub> (*fiscal stress*) dengan X<sub>2</sub> (PAD) sebesar -0.061926 < 0,80, sehingga dapat diinterpretasikan antara variabel *fiscal stress* dengan variabel PAD tidak terjadi korelasi. Nilai korelasi X<sub>1</sub> (*fiscal stress*) dengan X<sub>3</sub> (dana perimbangan) berada pada angka - 0.208177 < 0,80 yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi antara variabel *fiscal stress* dengan dana perimbangan. X<sub>2</sub> (PAD) dengan X<sub>3</sub> (dana perimbangan) memiliki nilai sebesar 0.467606 < 0,80, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi korelasi antara variabel PAD dengan dana perimbangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil Uji Autokorelasi – Durbin-Watson

Hasil uji autokorelasi dengan Durbin- Watson

dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1.777027. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel  $\alpha = 5\%$ , jumlah sampel (n) sebesar 50 dan jumlah variabel independen sebesar 3 (k=3), maka diperoleh nilai tabel Durbin-Watson yaitu d<sub>L</sub> = 1.46246 dan d<sub>U</sub> 1.62833. Dari nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 1.777027 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa d<sub>U</sub> < DW < 4-d<sub>U</sub> dengan nilai 1.62833 < 1.777027 < 2,37167 sehingga dinyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.

Hasil Uji Heterokedastisitas-Glejser

Tabel 4. Interpretasi Uji Glejser

Variabel Independen	Probabilitas	Hasil
Fiscal Stress	0.2185	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PAD	0.5362	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana Perimbangan	0.0019	Terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan hasil yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser menunjukkan bahwa variabel *fiscal stress* dan pendapatan asli daerah tidak terjadi heteroskedastisitas hal ini dibuktikan memiliki nilai lebih besar dari 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima, sedangkan variabel dana perimbangan terjadi heteroskedastisitas dengan nilai *absolute residual*. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Hasil dari analisis uji t menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen secara parsial signifikan atau tidak signifikan mempengaruhi. Pada variabel X<sub>1</sub> (*Fiscal Stress*/tekanan keuangan) memiliki nilai t hitung sebesar 0.675186, dan nilai probabilitas *Fiscal Stress* 0.5038 > 0,05. Hal ini memiliki arti bahwa secara parsial *Fiscal Stress* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

H<sub>1</sub> : Probabilitas > 0,05 maka H<sub>a</sub> ditolak, H<sub>0</sub> diterima.

Pada variabel X<sub>2</sub> (PAD) memiliki nilai t hitung sebesar 11.44780, dan nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah 0.0000 < 0,05. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

H<sub>2</sub> : Probabilitas < 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak, H<sub>a</sub> diterima.

Pada variabel X<sub>3</sub> (Dana Perimbangan) memiliki nilai t hitung sebesar -5.962529, dan nilai probabilitas Dana Perimbangan 0.0000 < 0,05. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

$H_3$  : Probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima

#### Uji F (Uji Simultan)

Hasil dari analisis uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 277.7434 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari signifikansi 0,05 ( $0,0000 < 0,05$ ). Hal ini memiliki arti bahwa pada tingkat  $\alpha = 0,05$  antara *Fiscal Stress*, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersamasama (simultan) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, yang artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dimana Nilai Kemandirian Keuangan Daerah sangat tergantung dengan variabel *Fiscal Stress*, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan.

#### Koefisien Determinasi Ajusted ( $R^2$ )

Hasil dari analisis uji koefisien determinasi dengan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.985460, artinya 98% menjelaskan variasi nilai Kemandirian Keuangan Daerah dapat dipengaruhi oleh *Fiscal Stress*, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan. Sedangkan 2% Nilai kemandirian keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Hal ini menyatakan bahwa perubahan kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB disebabkan oleh variabel independen (*Fiscal Stress*, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan).

### Pembahasan

#### 1. Pengaruh Fiscal Stress terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis pertamadalam penelitian ini adalah *Fiscal Stress* (X1). Pada tabel 2 nilai probabilitas *Fiscal Stress* (X1) sebesar 0.5038 lebih besar dari  $\alpha 0,05$  ( $0.5038 > 0,05$ ) dengan nilai *t-statistic* sebesar 0.675186. Artinya, *Fiscal Stress* (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y), maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan *fiscal stress* secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB ditolak. Hasil ini menjelaskan bahwa tekanan keuangan/*fiscal stress* belum memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini bisa disebabkan oleh pemanfaatan/pengelolaan pendapatan daerah yang utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat masih belum efektif. Menurut Syaliha (2021) adanya *fiscal stress* hanya untuk mengukur seberapa besar kemandirian keuangan daerah sehingga memberikan motivasi bagi pemerintah

daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya agar dapat meminimalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Akan tetapi, *fiscal stress* sendiri mengindikasikan bahwa jika pengeluaran daerah yaitu peningkatan belanja (modal) tidak sesuai dengan kenaikan pendapatan daerah, akan menimbulkan *fiscal stress*/tekanan keuangan. Menurut Prasetyo & Rahayu (2019) meskipun daerah mengalami *fiscal stress* (tekanan keuangan) karena penurunan pendapatan atau peningkatan pengeluaran, alokasi dana dari pusat sering kali dapat menutupi kekurangan tersebut. Dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga daerah tidak terlalu bergantung pada pendapatan daerah dan mampu menjaga kemandirian keuangan daerah meskipun adanya *fiscal stress*/tekanan keuangan. Hal ini sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah dari Peacock dan Wiseman, dimana teori mereka menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah meningkat seiring waktu melalui mekanisme *displacement effect* yang dipicu oleh kejadian seperti krisis keuangan dalam kondisi *fiscal stress*/tekanan keuangan teori ini membantu menjelaskan bagaimana pemerintah menyesuaikan pengeluaran dan sumber pendapatannya. Saat terjadi tekanan keuangan pemerintah sering menghadapi peningkatan penerimaan, misalnya menaikkan pajak atau mencari pinjaman dan menekan pengeluaran publik.

#### 2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X2). Pada tabel 2 nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah (X2) sebesar 0.0000 lebih kecil dari  $\alpha 0,05$  ( $0.0000 > 0,05$ ) dengan nilai *t-statistic* sebesar 11.44780. Artinya, Pendapatan Asli Daerah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y), maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan pendapatan asli daerah secara parsial mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah menjadi prediktor utama yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya. Menurut Machfud & Asnawi (2020) Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari daerah itu sendiri, artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin baik tingkat kemandirian

keuangan daerah suatu daerah. Hal ini sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah dari *Peacock* dan *Wiseman*, dimana pendapatan asli daerah yang besar memungkinkan daerah akan meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan tanpa tergantung pada transfer pemerintah pusat. Sementara itu, dalam perspektif teori *Rostow*, pendapatan asli daerah mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi daerah yang mendukung kemandirian keuangan, dan dalam kerangka teori *Musgrave*, pendapatan asli daerah yang tinggi memungkinkan daerah menjalankan fungsi pemerintahannya secara mandiri.

### 3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan (X3). Pada tabel 2 nilai probabilitas Dana Perimbangan (X3) sebesar 0.0000 lebih kecil dari  $\alpha$  0,05 ( $0.0000 > 0,05$ ) dengan nilai t-statistic sebesar -5.962529. Artinya, Dana Perimbangan (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y), maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan dana perimbangan secara signifikan memengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan arah pengaruh yang negatif, hal ini terjadi ketika dana perimbangan semakin besar maka semakin kecil nilai kemandirian keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa dana perimbangan bisa mempengaruhi kemandirian keuangan daerah secara negatif, artinya ketergantungan daerah pada dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), dapat mengurangi insentif bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi pendapatan. Akibatnya, daerah lebih mengandalkan bantuan dari pusat daripada mengembangkan sumber pendapatan mandiri seperti pajak daerah dan retribusi. Menurut Kristina et al. (2021) meskipun dirancang untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, dana perimbangan dapat melemahkan kemandirian keuangan daerah jika penggunaannya tidak diimbangi dengan upaya daerah untuk meningkatkan pendapatan lokal secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah dari *Peacock* dan *Wiseman*, dalam teori mereka masyarakat memiliki tingkat toleransi terhadap pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Ketika daerah terlalu mengandalkan dana perimbangan dari pusat, mereka cenderung tidak memaksimalkan penggalan potensi pajak lokal.

### 4. Pengaruh Variabel Independen Secara Simultan

Secara simultan variabel independen Fiscal Stress, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan melihat nilai probabilitas F-statistic sebesar 2777.7434 dengan nilai Prob (F-Statistic) sebesar 0.000000 ( $0.000000 < 0,05$ ) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen (X) berpengaruh signifikan secara simultan (bersamaan) terhadap variabel dependen (Y). Artinya kenaikan dari jumlah Tekanan Keuangan/Fiscal Stress, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan akan mempengaruhi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Besarnya pengaruh kontribusi dari semua variabel bebas tercermin dari nilai koefisien determinan adjusted R2 sebesar 0.985460, artinya 98% menjelaskan variasi nilai Kemandirian Keuangan Daerah dapat dipengaruhi oleh Fiscal Stress, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan. Sedangkan 2% Nilai kemandirian keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Hal ini menyatakan bahwa perubahan kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB disebabkan oleh variabel fiscal stress, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Fiscal Stress tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2018-2022, sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat fiscal stress/tekanan keuangan yang dialami dalam bentuk defisit anggaran tidak secara langsung mempengaruhi kemampuan daerah untuk kemandirian keuangan daerah.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2018-2022, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan asli daerah akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kemandirian keuangan daerah, artinya semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin mandiri

- daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan keuangan daerah tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi.
3. Variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2018-2022, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil ini menunjukkan penerimaan dana perimbangan yang terjadi di suatu daerah akan berbanding terbalik dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya, semakin besar penerimaan dana perimbangan yang diterima daerah dari pemerintah pusat maka semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.
  4. Variabel *Fiscal Stress*, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2018-2022. Besarnya Pengaruh kontribusi dari semua variabel bebas tercermin dari nilai koefisien determinan *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.985460, artinya 98% menjelaskan variasi nilai Kemandirian Keuangan Daerah dapat dipengaruhi oleh *Fiscal Stress*, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan. Sedangkan 2% Nilai kemandirian keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
  5. Variabel Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang dominan mempengaruhi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2018- 2022. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan utama yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah seperti pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin kuat untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
- Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Machfud & Asnawi. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14-31.
- Maulana, G. (2022). *Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Prasetyo, A., & RAHAYU, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Fiscal Stress terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 2(4), 872-881.
- Syalih, R. (2021). *Pengaruh Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA) dan Legislature Size Terhadap Expenditure Change pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015- 2019* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).

## Daftar Pustaka

- Azwar, A. (2023). Analisis Ketahanan Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7 (1), 1-25.
- Bappenda Provinsi NTB. (2023). Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. NTB: Bappenda Provinsi NTB.
- Halim, A. (2013). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.